

Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Pantai Pangandaran Oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Pangandaran Saat Covid-19

Harish Hasbi Rahman Wakila¹; Dr. M.D. Enjat Munajat, S.Si. M.Ti.²; Imanudin Kudus, S.IP, M.SI³
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung,
Indonesia ¹harish16001@mail.unpad.ac.id ; ²mdenjatm@unpad.ac.id; ³iman.kudus@unpad.ac.id

ABSTRACT

Pangandaran is one of the districts in West Java that has great tourism potential. At the time of Covid 19, there were still tourists visiting Pangandaran Beach. At the time of Covid 19, many business actors were not operating because Pangandaran Beach was limited by tourists, even closed. Therefore, the Department of Tourism and Culture, which is abbreviated as Disparbud, created a Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the time of Covid with strict health protocols with the aim of increasing PAD when APBD funds were used for handling Covid. The tourism development program refers to the 2016-2022 Strategic Plan of Disparbud and the vision of the regent who wants Pangandaran to become a world-class tourism. In carrying out this research, the author uses the theory of Van matter and Van Horn, as a guide in analyzing the planning process carried out. There are 6 points in the process of implementing a policy, namely standardization and targets, resources, Organizational Characteristics, Organizational Communication, Attitudes of implementers and Social Environment. The purpose of this research is to describe and analyze how the implementation of the tourism development program by the Pangandaran Disparbud is carried out. This study uses a qualitative method, which will conduct interviews with various stakeholders, then will search for data through the relevant literature to strengthen the data that has been obtained from interviews. From this research, it will be seen how successful the implementation of the tourism development program in Pangandaran Regency was during the COVID-19 pandemic. The result of the research is that of the 6 dimensions of the problem, there are still 4 dimensions that have not been implemented properly, which consist of Standards and Policy Goals, Resources, Organizational Communication and the Economic Environment. Two dimensions that have been implemented well are the characteristics dimension and the Attitude Dimension of the Implementers. Therefore, it can be said that the implementation of the Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the Covid-19 pandemic has not been carried out properly. Therefore, the researcher advises Disparbud in carrying out its program to communicate more often with Tourism stakeholders and improve the implementation of the program standards so that when applied in the field it can run even better.

Keywords: Program Implementation, Tourism Development, Pangandaran

ABSTRAK

Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Pada saat Covid 19 berlangsung masih ada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Pada saat Covid 19 berlangsung banyak dari pelaku usaha yang tidak berdagang dikarenakan Pantai Pangandaran yang dibatasi wisatawannya, bahkan ditutup. Maka dari itu Dinas Pariwisata dan budaya yang disingkat menjadi Disparbud membuat Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid dengan protocol kesehatan yang ketat dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dikala dana APBD digunakan untuk penanganan Covid. Program pengembangan Pariwisata mengacu pada Renstra 2016-2022 Disparbud dan visi bupati yg ingin jadikan pangandaran menjadi wisata world class. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Van matter dan Van Horn, sebagai pedoman dalam menganalisis proses perencanaan yang dilakukan. Terdapat 6 point dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu standarisasi dan sasaran, sumberdaya, Karakteristik Organisasi, Komunikasi Organisasi, Sikap para pelaksana dan Lingkungan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan program pengembangan Pariwisata oleh Disparbud Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai macam stake holder, lalu akan mencari data melalui literature literature terkait untuk menguatkan dat yang sudah didapatkan dari wawancara. Dari penelitian ini akan dilihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi program pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada saat covid 19. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dari 6 dimensi permasalahan, masih terdapat 4 dimensi yang belum terlaksana dengan baik, yang terdiri dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Organisasi dan Lingkungan Ekonomi. Dua dimensi yang sudah terlaksana dengan baik adalah dimensi Karakteristik dan Dimensi Sikap para Pelaksana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi Program pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran saat Covid masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu peneliti memberi saran kepada Disparbud dalam menjalankan prrogramnya untuk lebih sering berkomunikasi dengan stakeholder Pariwisata dan meningkatkan standar implementasi program tersebut agar ketika diterapkan di lapangan dapat berjalan lebih baik lagi.

Kata kunci: Implemenasi program, Pengembangan Pariwisata, Pangandaran.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi Pariwisata yang besar. Pangandaran memiliki dasar hukum berdiri yang tertulis di dalam UU.No.21 Tahun 2012, yang mana di dalam pasalnya dibahas tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola wilayahnya. UU ini mengacu pada UU yang membahas tentang otonomi daerah, sehingga Pangandaran memiliki otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya.

Pangandaran memiliki 5 destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Budaya yang disingkat menjadi Disparbud di Pangandaran. 5 destinasi tersebut adalah:

1. Pantai Pangandaran
2. Pantai Karapyak
3. Batu Hiu
4. Batu Karas
5. Green Canyon

Kabupaten Pangandaran difokuskan untuk melakukan pembangunan Pariwisata dan budaya bahari dikarenakan memiliki potensi wisata yang besar pada wilayah tersebut dengan landasan hukum Pasal 25 Perda Prov.Jabar No.15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat yang memiliki tema pengembangan pariwisata bahari dan alam bahari di Priangan.

Pada penelitian ini akan memfokuskan pada pengamatan bagaimana implementasi program pengembangan pariwisata di Kawasan Pantai Pangandaran dikarenakan Pantai Pangandaran merupakan salah 1 ikon wisata di Pantai Pangandaran yang banyak dikunjungi, baik wisatawan local maupun wisatawan mancanegara.

Maka dari itu Dinas Pariwisata dan Budaya merancang Rencana pada tahun 2016-2021 berdasarkan pada RPJMD yang menekankan pada pengembangan Pariwisata. Rencana Strategis yang disingkat menjadi Renstra hasil rancangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya yang disingkat menjadi Disparbud Kabupaten Pangandaran mencoba untuk merealisasikan visi tersebut dengan membuat program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi Pariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 merupakan tahapan penyusunan program oleh Disparbud yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang visi mengenai konsep pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut "Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia" tujuan dari

pengembangan destinasi Pariwisata yang sesuai dengan visi adalah sebagai berikut: 1). Pembangunan Destinasi Pariwisata; 2). Pembangunan Industri Kepariwisata; 3). Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata; 4). Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Akan tetapi pada tahun Indonesia 2020 merupakan salah satu negara yang terdampak wabah Corona, termasuk Kabupaten Pangandaran yang terdampak Virus Corona ini berdampak pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia, salah satu nya berdampak pada kondisi Pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan disuatu tempat yang indetik dengan kerumunan. Virus Corona, yang mana salah satu peningkatan penyebaran virus Corona yang efektif dilakukan apabila terjadi kerumunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya yang disingkat menjadi Disparbud pada saat Covid 19 berlangsung di Pantai Pangandaran. Indikator dari program ini adalah mendapatkan PAD yang sebesar-besarnya.

Pantai Pangandaran mengalami penurunan drastic pada jumlah pengunjung yang datang dikarenakan di Pangandaran maupun sebagian besar di wilayah Indonesia membuat kebijakan PSBB dan pembatasan kunjungan wisatawan ke lokasi wisata. Sehingga berdampak pada PAD wisata dari Pantai Pangandaran. PAD yang didapatkan mengalami penurunan.

Daya Tarik Wisatawan

DAYA TARIK WISATA	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
Pantai Pangandaran	13.326.055.000	10.185.207.500

Maka dari itu pada Agustus tahun 2020, Pemkab Pangandaran memberikan kelonggaran untuk para wisatawan diperbolehkan berwisata di Pangandaran. Pemkab Pangandaran bersama pengelola wisata Pantai Pangandaran membuat peraturan mengenai Protokol Kesehatan yang harus dipatuhi oleh pengunjung Pantai Pangandaran dalam rangka mengikuti peraturan yang ada. Pengelola Wisata Pantai Pangandaran membuat infrastruktur prokes, seperti membuat keran cuci tangan di beberapa titik yang dikunjungi oleh wisatawan, lalu membuat plang himbauan mencegah covid untuk dibaca oleh pengunjung Pantai Pangandaran.

Tabel 1. 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DISPARBUD Kabupaten Pangandaran

Program	Sasaran Program	Indikator Program
Pengembangan Pariwisata	Presentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah PAD dari sector Pariwisata

LAKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2020

Peningkatan pelayanan tersebut berupa penambahan infrastruktur untuk mencuci tangan di beberapa titik yang dikunjungi oleh wisatawan, lalu penambahan Satgas Covid-19 yang langsung memantau wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran dalam rangka menegakan prokes, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir saat berkunjung ke lokasi wisata, baik pantai Pangandaran maupun lokasi wisata yang ada di Pangandaran. Fasilitas berikutnya adalah pembatasan waktu bagi pengunjung yang mengunjungi Pantai Pangandaran maupun lokasi wisata lain. Pembatasan waktu diberikan dengan durasi jam yang sudah ditentukan oleh Disparbud Kab.Pangandaran. Upaya ini dilakukan dalam rangka membuat pengunjung Wisata Pangandaran agar lebih tenang saat berwisata sekaligus berhati-hati dengan imbauan yang diberikan oleh satgas Covid-19.

Tabel 1. 2 Realisasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DISPARBUD Kabupaten Pangandaran

Program	Indikator Program	Target Program	Realisasi Program
Pengembangan Pariwisata	Jumlah PAD dari sector Pariwisata	11 Milyar	Rp.13.782.568.250
	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 Lokasi wisata	5 Lokasi Wisata

Lakip Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Pengelola Kawasan Pantai Pangandaran juga melibatkan Masyarakat seperti komunitas yang melakukan pembersihan pantai yang dilakukan secara rutin, asosiasi pengelola hotel Indonesia Kabupaten Pangandaran. Sesuai dengan Undang Undang bahwa ketika sedang melaksanakan program, diperlukan kerjasama yang baik antar pihak yang melaksanakan program, yaitu dari pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat. Pembagian ini berdasarkan landasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan siapa saja pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan pariwisata di Indonesia, terdiri dari:

- 1) Pemda Kabupaten Pangandaran

- 2) Kedua masyarakat, baik sebagai tenaga kerja, pelaku Kegiatan usaha kepariwisataan maupun sebagai tuan rumah (host)
- 3) Ketiga swasta/industri baik yaitu pihak industry yang berada di luar negeri.

Pembangunan infrastruktur juga dilakukan dalam rangka melaksanakan Rencana kerja yang sudah dirancang. Pembangunannya berupa membangun bunker boogie, penataan Pantai Barat dan Pantai Timur, pembangunan gate Tol Pantai Pangandaran agar infrastruktur di Pangandaran menjadi baik.

Akan tetapi terdapat kegiatan penataan dan pembangunan infrastruktur yang ada di dalam rencana kerja yang tidak terealisasi dikarenakan kurangnya dana yang disebabkan karena APBD sector Disparbud ditarik oleh Pemda Kabupaten Pangandaran untuk penanganan Covid. Selain itu wacana pengembangan pariwisata Virtual sudah direncanakan oleh pemda dan sudah dicontohkan oleh Kemenparkraf belum terlaksana dikarenakan keterbatasan modal untuk membangun infrastruktur teknologi.

Melihat kasus diatas, menurut observasi dari peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam perencanaan program

- 1) Keberjalanan kegiatan Pelayanan pariwisata pada saat Covid 19 di dalam program kebijakan pengembangan Pariwisata pada saat Covid dilihat belum sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, dikarenakan masih terlihat wisatawan dan pelaku wisata yang tidak mematuhi protocol kesehatan. sasaran bukanya pantai Pangandaran adalah wisatawan yang mematuhi Prokes. Selain itu SDM yang memantau di Pantai Pangandaran kurang banyak, hanya berjumlah 5 orang.
- 2) Dalam Komunikasi dan kerjasama antar organisasi dirasa sudah berjalan. Akan tetapi belum dilakukan secara maksimal, seperti ketika para pelaku Ekonomi belum membentuk komunitas, sehingga menyulitkan komunikasi antara Komunitas Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah dikarenakan belum terbentuknya komunitas yang menyebabkan para pelaku Ekonomi kreatif masih sendiri sendiri dalam melakukan aktifitas Ekonomi Kreatif.
- 3) Kurangnya infrastuktur teknologi untuk menerapkan wisata virtual. Sehingga dalam inovasi teknologi seperti pariwisata secara virtual yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata RI masih belum diterapkan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran sampai saat ini yang mana dapat mendongkrak PAD Kabupaten Pangandaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini memanfaatkan individu atau kelompok yang memiliki opini dalam permasalahan yang terjadi. Peneliti menggunakan teori Van Matter dan Van Hor'n sebagai proses dari Implementasi Program Pengembangan Pariwisata yang dilakukan oleh Disparbud Pangandaran.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari responden, lalu menganalisis dengan cara induktif membangun dari rincian ke tema umum. Kemudian dilakukan interpretasi mengenai maksud data yang sudah didapatkan.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumen (Cresswell, 2010). Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) dimana terdapat tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber.

PENELITIAN TERKAIT

Penelitian pertama berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias (Medlin, 2020). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nias, meneliti bagaimana pengembangan Pariwisata yang ada di Kabupaten Nias.

Latar belakang permasalahan tersebut adalah bahwa terdapat kendala yang dihadapi pada proses pengembangan destinasi Pariwisata, yaitu masalah komunikasi. Koordinasi-Kordinasi yang dilakukan kepada dinas-dinas lain tidak semuanya mendapat respon yang baik. Penyebabnya dikarenakan terdapat ego sektoral dinas yang menganggap bahwa itu hanya menjadi urusan dinas yang bersangkutan saja. Selain itu terdapat kesulitan dalam mengkomunikasikan program dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Teori yang digunakan adalah teori dari Van Matter dan Van Horn yang berisi bahwa implementasi kebijakan memiliki 6 variabel, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Pada saat penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara.

Penelitian berikutnya berjudul Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kampung Wisata Pasir Kunci Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung berung Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dilakukan pada tahun (Rachmani, 2014). Penelitian tersebut dilakukan dengan

latar belakang infrastruktur penunjang wisata yang sederhana, seperti infrastruktur mushola, kamar mandi di area wisata pasir kunci yang merupakan wisata alam yang terdapat berbagai macam jenis daya tarik wisata, salah satunya adalah wisata agrowisata, yang mana masyarakatnya juga kurang berpartisipasi dalam mengembangkan destinasi dikarenakan kurangnya intensitas sosialisasi dari Disparbud yang berdampak pada kurang suksesnya keberjalanan program tersebut.

Teori yang dimasukan adalah teori dari Charles O Jones yang berisi tentang implementasi program yang merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.

Terdapat penelitian selanjutnya yang berjudul Implementasi Program Pengembangan Pariwisata di Situ Bagendit Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut (Agus Nurjaman, 2018). Yang Latar belakang penelitian tersebut dikarenakan Infrastruktur di Situ Bagendit kurang memadai dalam proses pengembangan Pariwisata. Walaupun pengunjung banyak yang datang ke situ Bagendit, akan tetapi perencanaan pengembangan potensi wisata di Situ Bagendit dalam pelaksanaan Program, yaitu program pemeliharaan fasilitas dan tempat wisata yang kurang baik, pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang kurang baik seperti pembangunan tenda semi permanen yang sebabkan kawasan situ bagendit jadi kumuh.

Teori yang dimasukan adalah teori dari Charles O Jones yang berisi tentang implementasi program yang merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.

HASIL DAN DISKUSI

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh standar dan sasaran kebijakan. Untuk menentukan Standar dan sasaran kebijakan diharuskan jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana. Akan tetapi Implementasi kebijakan dapat gagal apabila dilaksanakan dengan tidak memahami bagaimana standar dan sasaran kebijakan yang ada. Mengenai standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan landasan hokum dan Rancangan Program yang sudah dirancang oleh Pelaksana kebijakan, yaitu Disparbud.

Menurut penelitian peneliti dan Kepala Seksi Pengembangan Wisata Disparbud Pangandaran, Standar dan Sasaran yang diterapkan berasal dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun

2018-2025 yang diturunkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang visi mengenai konsep pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Teknisnya dari Kegiatan Program dibuat di dalam Rencana Kerja Disparbud.

Indikator yang pertama yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan Dalam Implementasi Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada saat Covid 19. Sesuai dengan pendapat Van Meter Dan Van Horn (1975) yang dikutip berasal dari Kurniawan & Maani (2019) untuk mengukur suatu Standar dan ketercapaian dari program suatu kebijakan, para pelaksana kebijakan harus memenuhi Standar yang ada dalam proses implementasi program kebijakan.

a. Kejelasan dan Standar Sasaran Kebijakan

Sumber daya merupakan Program pengembangan Pariwisata secara jelas mengikuti regulasi yang ada. Regulasi yang ada berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018- 2025 yang diturunkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang visi mengenai konsep pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Teknisnya dari Kegiatan Program dibuat di dalam Rencana Kerja Disparbud.

Bahwa keseluruhan aturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan kebijakan program yang mana memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dikarenakan kejelasan Standar landasan hukum mengenai kebijakan program dapat mempermudah Pemerintah dalam mensosialisasikannya kepada Masyarakat. Jadi dengan dijelaskan maka tidak ada yang mempertanyakan. Dalam pembuatan Program kebijakan sering terjadinya proses kegagalan apabila Standar dan sasaran Implementasi Kebijakan bentuknya kurang jelas.

Program pengembangan Pariwisata yang dibuat oleh Disparbud adalah program pengembangan Pariwisata berupa kegiatan pelayanan pariwisata pada saat Covid 19. Program Pengembangan Pariwisata yang dilakukan pada saat Covid 19 memiliki sasaran bahwa wisatawan yang berkunjung harus sehat agar penulawan Covid 19 tidak ada di Pantai Pangandaran dan mematuhi prokes. Jadi ketika di Pantai Pangandaran wisatawan berkunjung, maka semua yang

berkunjung aman terkendali dikarenakan persyaratan pengunjung adalah harus sehat wal afiat. Selain itu di Pantai Pangandarannya sendiri terdapat pengawas pantai yang bertujuan untuk memonitoring wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Jadi apabila terjadi

No	Pihak yang berada di Pantai Pangandaran	Jumlah Personel
1	Disparbud Pangandaran	1
2	Warga Pantai Pangandaran	2
3	Pelaku wisata (Penyedia Jasa Penginapan, penyewaan ATV Trail)	3
4	Pedagang dan pelaku Ekonomi Kreatif	2202 Personel
5	Pegawai Hotel	1000 Personel

pelanggaran protocol Covid, maka tim monitoring akan menindak wisatawan tersebut. Tim monitoring dibantu oleh satgas Covid 19 yang terdiri dari BPBD, Jaga lembur, Kepolisian , TNI. Wisatawan diharapkan untuk tidak berkrumun agar mencegah penularan Covid 19.

Disparbud membuka pantai agar wisatawan yang berkunjung bisa berwisata kembali. Akan tetapi masih ada pelaku dan wisatawan yang melanggar protocol Covid 19, yang mana dapat menyebabkan Kegiatan dari program pengembangan Pariwisata tidak sesuai dengan standar yang ada, seperti di dalam program tersebut terdapat peraturan harus mematuhi Protokol Covid 19. Tidak sesuai dengan Standar dikarenakan wisatawan yang beraktifitas tidak tepat sasaran, yaitu wisatawan yang seharusnya taat prokes dan pelaku wisata yang menjalankan prokes.

Tujuan Pengembangan PAD di Pangandaran

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkat nya pengembangan kepariwisataan	Jumlah PAD dari sector Pariwisata

Dibukanya Pantai Pangandaran dalam rangka untuk meningkatkan PAD dalam

rangka memenuhi standar aturan pada PAD dari sector Pariwisata di Pantai Pangandaran.

Dalam rang pelaksanaan program Wisata Virtual sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang disingkat jadi kemenparekraf direncanakan oleh Pemda Pangandaran dirasa belum bisa berjalan, dikarenakan menurut Bagian Kabid Analisis dan Pemasaran Pariwisata mengatakan bahwa Untuk pengadaan infrastruktur yang menunjang wisata virtual dirasa belum bisa diadakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Disparbud. Belum bisanya berjalan wacana wisata virtual tidak sesuai dengan Standar dan sasaran yang dianjurkan oleh Satgas Covid Nasional untuk mengurangi kerumunan dengan banyak orang.

Menurut analisis peneliti, standar dan sasaran kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Disparbud masih belum memenuhi Standar. Dikarenakan realitanya ketika di Pantai Pangandaran, masih banyak pelaku wisata dan wisatawan yang tidak mematuhi Prokes Covid 19, yang mana syarat dibukanya Wisata pantai Pangandaran adalah semua pelaku wisata taat terhadap prokes. Selain itu infrastruktur prokes di Pantai Pangandaran kurang terawat dengan baik, yang mana kran untuk cuci tangan masih ada yang tidak menyala.

b. Ketercapaian dan Standar Program

Dalam pelaksanaan program diperlukan target dari pencapaian program. Target dari pencapaian program diperlukan agar Program yang dijalankan dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan standar yang berlaku. Standar yang berlaku dapat membawa keberhasilan dari suatu program dikarenakan pelaksana dapat menjalankan program yang sedang dijalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena tanpa adanya standar dalam kebijakan maka dijalankannya program tidak sesuai dengan program yang berlaku.

Kasi Pengembangan pariwisata pada saat peneliti wawancara mengatakan bahwa Standar dari pengawasan pelayanan Covid 19 di Pantai Pangandaran adalah dengan adanya Tim monitoring yang ditugaskan oleh Disparbud untuk memantau wisatawan yang berkunjung

kePantai Pnagnadaran. Tim Monitoring tersebut berjumlah 5 orang yang menjaga di beberapa titik dalam rangka memantau wisatawan dan pelaku wisata yang sedang berwisata di Pantai Pangandaran. Tim Monitoring tersebut bekerjasama dengan Satgas Covid 19 yang terdiri dari Jaga Lembur, BPBD, Kepolisian dan TNI. Mereka bekerjasama untuk mengawasi Pantai Pangandaran agar yang beraktifitas di Pantai Pangandaran aman dan terhindar dari penularan Covid 19.

Akan tetapi yang terjadi di Pantai Pangandaran kondisinya adalah belum memenuhi standar pelayanan Covid. Dikarenakan menurut Kasi Pengembangan Pariwisata mengatakan bahwa dengan ditugaskannya 5 orang tim monitoring menurut perencanaan mereka sudah cukup untuk memantau aktifitas wisatawan di Pantai Pangandaran. Akan tetapi menurut Aparat Desa mengatakan bahwa penugasan tim Satgas Covid 19 belum cukup dikarenakan jumlah perbandingan yang jauh antara jumlah tim monitoring yang sedikit dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang membludak banyak. Wisatawan juga belum memahami bagaimana standar pelayanan Pariwisata pada saat Covid, sehingga masih banyak yang belum mematuhi protocol kesehatan. Sehingga dari pemantauan peneliti yang mengetahui lokasi di Pantai Pangandaran yang sering ramai sebanyak lebih dari 30% kurang mematuhi protocol kesehatan. Pantai Barukaras sempat ditutup dikarenakan membludaknya wisatawan pada musim liburan, yang mana wisatawan yang berkunjung tidak mematuhi protocol kesehatan.

Selain pelayanan wisata pada saat Covid, dalam penataan Pantai barat dan Pantai Timur ada beberapa aspek yang kurang rapih dalam penataannya, seperti penataan taman di Pantai Barat dan Pantai Timur, yang mana taman tersebut bunganya kurang segar dikarenakan tanahnya kurang cocok. Sehingga mengganggu pemandangan yang indah, seperti yang sudah diwawancara ke pihak aparat desa, bahwa taman tersebut kurang terurus bunganya. Berikutnya perawatan trotoar yang kurang rutin walaupun sudah direncanakan proses perawatannya, menyebabkan trotoar yang terbuat dari kayu menjadi lapuk, Sehingga mengganggu pemandangan wisatawan yang sedang

berjalan kaki. Sehingga kondisi ini menyebabkan kurang memenuhi standar dalam penataan yang dilakukan oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran. Jadi sasaran penataan dan perawatan infrastruktur, khususnya penataan taman dan perawatan infrastruktur trotoar kurang tercapai karena lebih mementingkan pembangunan taman disaat dana APBD dialihkan untuk penanganan covid apabila dibandingkan dengan penataan infrastruktur seperti renovasi trotoar yang sudah rusak akibat galian gorong gorong dan trotoar sudah lapuh yang terbuat dari kayu.

No	Infrastruktur yang butuh perawatan di Pantai Pangandaran	Jumlah
1	Trotoar	4 ruas jalur di Pantai Pangandaran
2	Infrastruktur Prokes tempat cuci tangan	10 titik
3	Tanaman di Taman Pantai Pangandaran	Di Taman dan trotoar seluruh titik Pantai Pangandaran
4	Tempat duduk di sepanjang Pantai Timur	1 ruas jalur trotoar Pantai Timur

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Salah satu kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran di fokuskan pada Kawasan Pantai Pangandaran. Dibutuhkan SDM dalam menjalankan Program Pariwisata di Pantai Pangandaran maupun dibutuhkan Sumber Daya Finansial.

Dukungan Finansial yang kuat dapat menjalankan suatu program dibantu dengan SDM yang baik. Apabila tidak ada dukungan finansial maka kemungkinan besar tidak dapat menjalankan Program yang sudah direncanakan. Dikarenakan finansial dibutuhkan dalam menerapkan suatu program besar. Seperti contoh ketika sedang membangun bangunan fisik yang membutuhkan sumber daya finansial yang besar.

Lalu terdapat 2 Indikator yang menentukan keberhasilan Sumberdaya, yaitu Indikator:

1. Sumberdaya Manusia
2. Sumberdaya Financial

a. Sumberdaya Manusia

Berbagai macam program yang dijalankan oleh pemerintah membutuhkan SDM yang mumpuni, yang mana SDM yang mumpuni lalu handal dalam menjalankan tugasnya dapat menentukan keberhasilan suatu program. Begitu juga dengan Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran dapat dijalankan apabila memiliki SDM yang handal. Dengan memiliki SDM yang handal maka program tersebut kemungkinan besar akan berjalan sesuai dengan rencana.

Disparbud sendiri memiliki memiliki 4 bidang yang mana ke 4 bidangnya membawahi 2 Kasi. Lalu terdapat 3 UPTD yang membawahi 3 Wilayah di Pangandaran. Disparbud sendiri membawahi 5 Destinasi Pariwisata di Pangandaran. Disparbud Pangandaran memiliki 31 ASN yang bertugas di Dinas Pariwisata dengan berbagai macam latar belakang jabatan dan pendidikan. Secara garis besar struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas yang memiliki bawahan yaitu Kepala Bidang. Yang kemudian Kepala bidang memiliki pelaksana teknis, yaitu Kepala Seksi dan Staff. Semua yang ada di Struktur Organisasi merupakan SDM yang bertujuan untuk menjalankan program yang sudah dibuat oleh Disparbud dengan melaksanakan SOP tertentu.

Dalam penanggulangan Covid di Pantai Pangandaran, Disparbud menugaskan 5 orang sebagai tim monitoring yang tugasnya men cek dan memantau aktivitas wisatawan di Pantai Pangandaran dan dapat bekerja dengan efektif. Kasi Pengembangan Pariwisata yang peneliti

No	Program	Anggaran	Ketercapaian
1	Penataan Kawasan Pantai Barat dan Timur Pangandaran)	Rp. 651.277.000	100%
2	Revitalisasi Pintu TOL 3 Gate Pangandaran	Rp.879.722.000	100%
3	Pelayanan Wisata Saat Covid-19	Rp.240.500.000	100%
Total Anggaran		Rp.1.771.499.000	

wawancarai berpendapat bahwa penempatan tim monitoring yang terdiri dari 5 orang efektif dalam bertugas mengawasi Wisatawan di Pantai Pangandaran dikarenakan ke 5 orang tersebut berkordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, Satgas Covid yang terdiri dari BPBD dan Satgas Jaga Lembur.

Lalu jumlah pegawai Disparbud yang bertugas mempengaruhi keberjalanan program yang ada. Akan tetapi pihak desa berpendapat bahwa tim monitoring dan pihak lain seperti tim satgas Jaga lembur kurang efektif dikarenakan jarang memantau. Pihak satgas Jaga Lembur banyak yang hanya jaga pos loket masuk. Selain itu jumlah pengunjung dan tim monitoring beserta aparat satgas Covid lainnya tidak cukup melakukan pengawasan terhadap wisatawan dikarenakan sedikitnya tim monitoring dan aparat satgas Covid yang memantau Pantai Pangandaran yang jangkauan nya luas beserta jumlah wisatawan yang banyak.

Hasil pemantauan dan wawancara yang peneliti lakukan di Disparbud, tim monitoring dan tim satgas lainnya kurang efektif dalam menjaga dan memantau wisatawan yang banyak berkunjung ke Pantai Pangandaran, walaupun tim monitoring Disparbud beserta aparat satgas lainnya sudah melakukan himbauan kepada

wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Selain itu tim monitoring juga tidak diberikan pelatihan bagaimana menanggulangi Covid di Lokasi Wisata. Hal ini akan berdampak pada kesigapan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Disparbud yang menanggulangi Covid 19.

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya Finansial diperlukan oleh semua lini di Disparbud dalam rangka menjalankan program yang sudah dirancang oleh Disparbud. Sumberdaya Finansial diberikan dalam rangka menunjang pengembangan infrastruktur, program pengembangan Pariwisata, dll. Disparbud mendapatkan Sumber daya Finansial yang berasal dari dana APBD. Dana APBD digunakan untuk menjalankan program yang sudah dirancang oleh Disparbud. Sumberdaya Financial merupakan salah satu penentu dari keberhasilan suatu program.

Sumberdaya Finansial diperlukan oleh Disparbud dalam rangka membuat program yang sudah ada. Akan tetapi pada saat Pancemic Corona saat ini banyak dari kegiatan Program Pengembangan Pariwisata yang tidak berjalan dikarenakan Pantai Pangandaran ditutup dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan pendapatan PAD terganggu. Selanjutnya ketika Pantai Pangandaran dibuka secara perlahan, wisatawan yang datang juga masih sedikit, sehingga mengganggu besaran PAD yang didapatkan oleh Disparbud. Berikut PAD yang akan dilampirkan pada tahun 2020.

Lokasi Wisata	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
Pantai Pangandaran	13.326.055.000	10.185.207.500

Terjadi perubahan yang sangat drastis pada PAD pariwisata Pantai Pangandaran tahun 2020 dikarenakan sedikit wisatawan yang berdatangan ke Pantai Pangandaran. Sehingga yang seharusnya PAD Pantai Pangandaran mencapai target, pada saat Pandemic tidak mencapai target. Sumberdaya Finansial yang berasal dari APBD dialihkan untuk sektor kesehatan. Dengan dialihkannya Sumberdaya Finansial ke sector lain otomatis kegiatan-kegiatan dari program tidak dapat dijalankan. Sehingga banyak dari kegiatan yang terbengkalai.

Kegiatan Program berikutnya adalah penataan Pantai Barat dan Pantai Timur Pantai Pangandaran dalam rangka agar kawasan Pantai Pangandaran tertata rapih. Selain itu dengan tertatanya Kawasan Pantai Barat dan timur Pangandaran, maka wisatawan menjad enjoy ketika berwisata ke Pantai Pangandaran. Penataan Pantainya berupa Pembangunan Taman dan bunker boogie di Pantai Barat, kemudian revitalisasi Gate Pintu Tol Pantai Pangandaran yang bertujuan agar Kawasan Pantai Pangandaran terlihat bagus ketika dilihat dari depan.

Peneliti menganalisis bahwa dalam penggunaan Sumberdaya Finansial masih belum bisa maksimal, dikarenakan dana APBD Disparbud ditarik semua oleh Pemkab Pangandaran. Disparbud sendiri belum memiliki planning yang banyak dalam perawatan infrastruktur ketika dana tersebut tidak ada. Solusinya adalah seperti Disparbud melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk perawatan infrastruktur yang ada. Dalam pelayanan wisata di Pantai Pangandaran saat covid 19 berlangsung tidak maksimal seperti perawatan infrastruktur Covid 19 yang kurang terlaksana yang mana harusnya seperti penambahan sabun dan air di tempat cuci harus dilakukan secara rutin, lalu pembagian masker yang tidak merata di titik lokasi wisata yang harusnya terjadi pemerataan dalam pembagian masker agar mencegah terjadinya penyebaran Covid 19 di Pantai Pangandaran.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Purnamasari & Pradana (2017) menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka perlunya untuk diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma – norma dan aturan, serta pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah di tentukan karena organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya. Garis-garis dari berbagai bingkai untuk menunjukkan interaksi yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

a. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik pelaksana dapat diartikan sebagai ciri-ciri organisasi pelaksana. Karakteristik pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi dan meliputi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi yang dilaksanakan di Kantor Disparbud sudah mengikuti yang seharusnya. Yaitu ketika Kepala Dinas berkordinasi dengan Bupati untuk Visi yang dimilikinya agar bisa diterapkan pada bidang Pariwisata. Lalu Kepala Dinas berkordinasi dengan para Kepala Bidang untuk segera membentuk program yang akan dijalankan dalam rangka melaksanakan Visi Bupati. Lalu Kepala Bidang membuat program sesuai dengan bidangnya masing masing yang kemudian dikordinasikan kepada Kepala Seksi. Kepala Seksi selanjutnya memberi arahan langsung kepada staff untuk melaksanakan tugas yg harus dijalankan.

Kepala Dinas beserta Kepala bidang dan Kepala staffnya memiliki pengalaman kerja yang tinggi apabila dihitung rata rata dengan latar belakan sarjana. Sehingga memiliki kemampuan kerja yang mumpuni. Hal ini mempengaruhi peforma birokrasi yang ada. Hal ini terbukti di Disparbud Kabupaten Pangandran yang memiliki 2 tingkatan kordinasi antara dari Kepala Dinas sampai staff, yaitu melalui kepala bidang dan Kepala Seksi. Kepala Dinas bertugas memberikan Arahan berupa bentuk penerjemahan dari visi Bupati yang kemudian disampaikan kepada bidang dan setelah itu disampaikan dalam bentuk teknis oleh kepala seksi yang menyampaikan kepada staff.

Kepala Dinas beserta Kepala bidang dan Kepala staffnya memiliki pengalaman kerja yang tinggi apabila dihitung rata rata daengan latar belakan sarjana. Sehingga memiliki kemampuan kerja yang mumpuni. Hal ini mempengaruhi peforma birokrasi yang ada. Hal ini terbukti di Disparbud Kabupaten Pangandran yang memiliki 2 tingkatan kordinasi antara dari Kepala Dinas sampai staff, yaitu melalui kepala bidang dan Kepala Seksi. Kepala Dinas bertugas memberikan Arahan berupa

bentuk penerjemahan dari visi Bupati yang kemudian disampaikan kepada bidang dan setelah itu disampaikan dalam bentuk teknis oleh kepala seksi yang menyampaikan kepada staff.

Pada program pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran terdapat berbagai macam kegiatan yang dibuat oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Program ini dibuat oleh bidang pengembangan Pariwisata yang selanjutnya kegiatannya disusun untuk mengikuti keadaan. Komunitas Masyarakat yang terdiri dari komunitas Pariwisata, Komunitas Pandu laut yang tugasnya membersihkan Pantai dari sampah lalu para pelaku ekonomi kreatif diikut sertakan dalam pengembangan program Pariwisata Pantai Pangandaran. Dengan terlibatnya masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Pantai Pangandaran tentunya dibutuhkan dukungan dan tanggung jawab dari masyarakat agar implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat berhasil. Kemudian saya wawancarai Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparbud, bahwa pelatihan dilakukan oleh mitra Disparbud pada tahun 2020, yaitu Bank Indonesia. Pelatihan tersebut dilakukan selama 1 tahun sekali, yang mana teknisnya para pelaku ekonomi kreatif dapat memasarkan barangnya secara online, secara barang tersebut murah dikenal oleh orang.

Mitra Disparbud bersama BI mengadakan pelatihan kepada pelaku Ekonomi Kreatif agar para pedagang dapat mengenal platform secara Online. Akan tetapi pelatihan tersebut dilakukan dalam 1 x setahun, yang mana diperlukan secara rutin untuk pelatihan bagi pelaku Ekonomi kreatif agar dapat mengasah skill kemampuan berdagang mereka.

Maka dari itu hasil analisa dari peneliti bahwa struktur birokrasinya sudah berjalan dengan baik, dikarenakan alur dari struktur organisasi di Disparbud Kabupaten Pangandaran sudah terlihat jelas alurnya. Sehingga Struktur birokrasi yang dilaksanakan di Kantor Disparbud sudah mengikuti yang seharusnya, yang mana sudah jelas alur birokrasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas berkordinasi dengan bawahannya. Alur birokrasi dengan eksternal seperti kerjasama dengan pihak eksternal sudah jelas dilakukan dengan baik, seperti dengan komunitas- komunitas yang ada di Pantai Pangandaran.

b. Norma Norma Aturan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran dilakukan oleh Disparbud dengan SOP yang sudah ditentukan. Tentunya aturan pelaksanaan program kebijakan sudah tertera di Rencana Kerja, bagaimana proses pelaksanaan kebijakan dilakukan. Dalam melaksanakan program pengembangan Pariwisata pada saat Covid 19 di Pantai Pangandaran, tentunya ada norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh seluruh pelaksana kebijakan, norma-norma atau aturan tersebut telah ditentukan melalui standar dan mekanisme atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, sehingga para pelaksana kebijakan baik dari Disparbud Kabupaten Pangandaran, serta para mitra kerja Disparbud.

Dalam pelaksanaan program pengembangan wisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid, Disparbud sudah memberikan SOP dalam pelaksanaan Pariwisata di Pantai Pangandaran. SOP tersebut dibuat dalam rangka agar keberjalanan wisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid 19 berhasil dilaksanakan. Sehingga dapat dilaksanakan oleh Pelaku Wisata dan Wisatawan. SOP nya sendiri berupa penataan terhadap protocol kesehatan di Kawasan Pantai Pangandaran, lalu Pembatasan wisatawan di Kawasan Pantai Pangandaran dan di tempat penginapan, para pelaku wisata dan wisatawan kondisi tubuhnya sehat. Selain itu aturan yang dibuat adalah para pelaku wisata menjaga infrastruktur yang ada di Pantai Pangandaran.

Dalam pelaksanaan program pengembangan wisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid, Disparbud sudah memberikan SOP dalam pelaksanaan Pariwisata di Pantai Pangandaran. SOP tersebut dibuat dalam rangka agar keberjalanan wisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid 19 berhasil dilaksanakan. Sehingga dapat dilaksanakan oleh Pelaku Wisata dan Wisatawan. SOP nya sendiri berupa penataan terhadap protocol kesehatan di Kawasan Pantai Pangandaran, lalu Pembatasan wisatawan di Kawasan Pantai Pangandaran dan di tempat penginapan, para pelaku wisata dan wisatawan kondisi tubuhnya sehat. Selain itu aturan yang dibuat adalah para pelaku

wisata menjaga infrastruktur yang ada di Pantai Pangandaran.

Maka dari itu menurut analisis peneliti dalam pelaksanaan aturan, seperti sosialisasi pemaparan aturan penegakan prokes sudah dilakukan dengan baik walaupun masih terjadi pelanggaran prokes Covid 19 di beberapa titik di Pantai Pangandaran.

4) Komunikasi Organisasi

Purnamasari & Pradana (2017) mengatakan bahwa koordinasi menjadi metode yang ampuh dalam proses implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi menjadi sulit apabila salah satu pihak tidak setuju dengan keinginan dari pihak lainnya. Hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan pada beberapa badan pelaksana yang memiliki tingkatan yang sama belum efektif dikarenakan terdapat perbedaan hasil dilapangan. Kemudian terjadi ketidaksesuaian proses dari kegiatan tersebut.

a. Konsistensi atau keseragaman informasi yang diberikan

Pada Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran, informasi mengenai teknis pariwisata berada di Media Sosial yang dimiliki oleh Disparbud Kabupaten Pangandaran dan dari Pemda Kabupaten Pangandaran. Informasi mengenai PPKM, lalu PSBB maupun pembatasan Pariwisata berada di media tersebut. Informasi tersebut diberikan dalam rangka agar informasi yang ada jadi merata. Kerjasama dalam penanggulangan Covid di tempat wisata dilakukan dengan berbagai pihak, yaitu Satpol PP, Satgas Covid 19, Satgas Jaga Lembur, Dishub, Polres Ciamis dan Kodim. Kerjasama dirasa cukup baik karena terdapat briefing dan saat ini Kabupaten Pangandaran sudah mencapai Level PPKM terendah, yaitu Level 1. Yang mana banyak Masyarakat di Pantai Pangandaran yang sudah sehat. Informasi yang diberikan oleh Disparbud mengenai program pengembangan Pariwisata pada saat Covid menurut Kabid Informasi Pariwisata

Disparbud sudah cukup baik karena sudah banyak dishare di Media sosial.

No	Aparat prokes di Pantai Pangandaran
1	Tim Monitoring Disparbud Pangandaran
2	Satgas Covid BPBD
3	Jaga Lembur
4	Koramil
5	Kepolisian

Kasi Informasi Disparbud sendiri mengatakan memang simpang siur pembukaan Pantai Pangandaran pada saat Pandemic 19 memang ada. Terbukti banyak Wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran, akan tetapi pihak Disparbud sudah berusaha untuk memberikan informasi se jelas mungkin agar informasi yang didapatkan oleh Masyarakat menjadi jelas. Disparbud melalui tim monitoring penanggulangan Covid 19 di Pantai Pangandaran sudah berkordinasi dengan pihak Satgas Covid selalu menghimbau kepada warga dan wisatawan agar taat prokes. Kemudian para pelaku pariwisata sudah diberitahu agar vaksin sebelum dibukanya Pantai Pangandaran. Untuk sementara penataan Pantai Pangandaran diberhentikan.

Akan tetapi pada kondisi di Lapangan pada saat pelaksanaan pariwisata dalam rangka menjalankan program pengembangan Covid 19 belum sesuai dengan yang seharusnya. Terbukti pada saat seharusnya tim jaga lembur menjaga wisatawan yang ada di tempat keramaian, hasilnya malah hanya memantau di pos pintu masuk wisatawan, seperti hasil wawancara peneliti kepada Aparat Desa Pangandaran. Terbukti bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan tupoksi. Maka dari itu diperlukan keseragaman informasi agar berjalan dengan lancar. Selain itu banyak dari masyarakat yang keliru mendapatkan informasi yang ada di internet mengenai Pariwisata di Pangandaran. Yang mana ada wisatawan yang sudah sampai di Pangandaran, akan tetapi Pantai Pangandarannya tutup.

b. Ketepatan Komunikasi dengan Pelaksana

Disparbud Pangandaran sendiri memiliki media informasi yang biasa

menyampaikan informasi kepada Masyarakat maupun wisatawan. Disparbud mengusahakan agar informasi yang diberikan kepada Masyarakat dan wisatawan tepat. Dalam Program Pengembangan Pariwisata yang dilakukan oleh Disparbud dilakukan dengan cara kordinasi kepada berbagai pihak. Kordinasi tersebut dilakukan agar informasi yang diberikan tepat. Pada saat penanganan Covid 19 di Kawasan Pantai Timur, Tim monitoring dari Disparbud yang berjumlah 5 orang berkordinasi dengan Satgas Covid, Kepolisian, TNI agar penempatan personel efektif ditempatkan di beberapa titik. Ketepatan informasi juga dibutuhkan agar pemerataan informasi menjadi baik.

Ketepatan informasi yang diberikan juga perlu dipantau. Ketepatan informasi menyebabkan program yang sedang dijalankan menjadi sesuai dengan keinginan. Sehingga banyak pihak yang merasa puas dengan informasi yang ada. Maka dari itu media informasi harus jelas dalam menyampaikan informasi. Dikarenakan komunikasi yang baik di dalam suatu instansi menyebabkan program yang sedang berjalan menjadi lancar, seperti ketika diantara para pelaksana ada yang tidak sesuai dengan SOP dalam pelaksanaan program, maka bisa terus dilaksanakan dengan saling mengingatkan diantara para pelaksana.

Akan tetapi pada Kondisi di lapangan terbukti bahwa belum adanya ketepatan informasi dalam penanggulangan Covid 19, yang mana masih ada informasi-informasi yang kurang tepat yang menggambarkan tentang penanggulangan covid 19 di Pantai Pangandaran. Informasi yang kurang tepat dapat melemahkan Kordinasi antar pihak. Info di media sosial yang menyebutkan bahwa Pantai Pangandaran buka, yang padahal kenyataannya bahwa Pantai Pangandaran ditutup.

Banyak dari wisatawan yang sudah sampai di Pantai Pangandaran akan tetapi Pantai Pangandaran sedang ditutup. Berikutnya adalah pada saat PPKM Level 2 yang seharusnya keluar masuk Pangandaran dijaga oleh aparat keamanan, seperti polisi atau Satgas Covid tetapi mereka tidak berjaga di pos dikarenakan komando dari atasan aparat yang mengatakan tidak usah untuk berjaga. Sehingga menimbulkan informasi yang

kurang tepat. Selain itu masih qbanyak wisatawan yang berkrumun di Pantai Pangandaran dan tidak mendapatkan tindakan dari tim monitoring dan satgas Covid. Hal ini disebabkan karena mereka melihatnya bahwa kondisi sudah lebih aman dan belum diperlukan lagi aparat dalam jumlah banyak untuk berjaga memantau aktifitas di Pantai Pangandaran.

Dari pihak pedagang setelah peneliti wawancarai bahwa banyak dari mereka yang merasa kecewa dikarenakan Pantai Pangandaran ditutup dalam waktu lama, sehingga mereka kebingungan mau berjualan dimana. Diantara para pedagang ada yang menjual asset yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari tanpa ada nya pemasukan dari matapencaharian yang lain. Lalu sudah adaa harapan bahwa Pantai Pangandaran akan dibuka pada saat pandemic Corona. Akan tetapi yang terjadi adalah buka tutup Wisata Pantai tanpa adanya solusi untuk Masyarakat agar mencari pencaharian dari sector lain. Sehingga program pariwisata Pantai Pangandaran ditutup pada saat Covid dirasa belum tepat dikarenakan merugikan para pedagang ditambah dengan belum adanya solusi dari Disparbud terhadap pelaku wisata yang terdampak di Pantai Pangadaran. Sehingga Komunikasi nya dirasa belum tepat.

Ketepatan informasi yang diberikan di media sosial dalam pengumuman pembukaan Pantai Pangandaran masih belum tepat dikarenakan masih terdapat wisatawan yang kurang belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai buka tutup nya Pantai Pangandaran. Para pedagang dan pelaku wisata di Pantai Pangandaran juga merasa bingung kapan dibukanya Pantai Pangandaran dikarenakan pada saat ditutup total Pantai Pangandaran, mereka tidak dapat berdagang, sehingga mata pencaharian mereka hilang. Ketepatan informasi dalam pembagian bansos juga masih belum tepat dalam pendataannya dikarenakan masih ada pelaku wisata yang belum mendapatkan bansos dikarenakan tidak terdata di dalam pembagian bansos.

5) Sikap Para Pelaksana

Perlu diketahui jika salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implemntatornya. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan bagian –

bagian isi dari kebijakan maka implementator akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika ada beda pandangan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van meter dan van horn yang dikutip dari Widodo, (2010:104) menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

a. Pemahaman tentang Kebijakan

Pemahaman mengenai kebijakan diperlukan agar para staff dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang ada. Para staff dalam suatu Organisasi memerlukan bagaimana dalam penyikapan suatu organisasi yang sedang menjalankan program agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Apabila staff yang ada di suatu organisasi tidak memahami bagaimana program dijalankan, Maka Organisasi tersebut kemungkinan besar tidak dapat mencapai target yang ada.

Disparbud Pangandaran memiliki Program pengembangan Pariwisata yang kegiatannya adalah Pelayanan Wisata pada saat Covid, lalu berikutnya adalah Revitalisasi Gate Pintu Tol Pantai Pangandran yang terdiri dari 4 titik, Lalu berikutnya adalah Pembangunan Taman Di Pantai Barat dan Pembangunan Bunker bogie untuk penyimpanan Boogie yang disewakan oleh banyak pelaku wisata di Pantai Pangandaran.

No	Kegiatan dari Program Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran	Tingkat Keberhasilan
1	Revitalisasi Gate Pintu Tol Pantai Pangandaran 4 titik	100%
2	Pembangunan bunker boogie	100%
3	Pelayanan wisata saat Covid	100%
4	Pembangunan Taman Pantai Barat	100%

Pemahaman yang dimiliki oleh para staff Disparbud sudah baik. Maka dari itu Disparbud menerjunkan 5 orang sebagai tim monitoring untuk memonitor para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Dalam penyikapannya sendiri sudah mempersiapkan ke 5 orang tersebut dibantu dengan mitra Disparbud dalam penanggulangan Covid, yaitu Satgas Covid 19 Kabupaten Pangandaran, Jaga Lembur, Kepolisian dan TNI. Walaupun pemahaman dan sikapnya sudah baik, akan tetapi diturunkannya 5 orang kurang efektif dalam mengawasi Wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran dikarenakan jumlah Tim Monitoring tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran.

Dalam pemahaman kebijakan pelayanan wisata Covid 19 yang dilakukan oleh staff Disparbud, peneliti menganalisis bahwa Disparbud sudah paham mengenai penempatan staff yang memantau kondisi lapangan di Pantai Pangandaran, dikarenakan staff lapangan, yaitu tim monitoring Pantai Pangandaran yang memantau dan menegakan Prokes Covid 19 walaupun masih sedikit yang hanya berjumlah 5 orang dibantu dengan mitra Disparbud yang bertugas menangani Covid 19. Mereka juga paham mengapa program lain seperti penataan dan perawatan infrastruktur menjadi Mangkrak dikarenakan Dana APBD Disparbud Pangandaran ditarik semua oleh Pemkab Pangandaran untuk penanganan Covid 19.

b. Tanggapan Kebijakan

Kebijakan ditanggapi oleh pegawai Disparbud dalam rangka agar bisa dijalankan dengan baik. Tanggapan pedagang Pedagang mendukung apapun program dari Disparbud Pangandran. Maka dari itu apabila Disparbud mengeluarkan program, maka para pedagang siap mengikuti program tersebut, asalkan para pedagang dan pelaku wisata bisa menghasilkan uang dari program tersebut.

Pada saat Covid 19 berlangsung, para pedagang merasa bahwa seringnya kebijakan Pantai ditutup, lalu pembatasan jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Pangandaran menyebabkan penghasilan mereka menjadi sedikit dikarenakan yang belinya sedikit. Jadi dari para pedagang banyak yang protes apabila kebijakan dari Disparbud Pantai Pangandaran ditutup

secara total. Mereka menginginkan dibuka walaupun ada pembatasan pengunjung. Sehingga mereka tetap mendapatkan penghasilan di Pantai Pangandaran. Apabila Pantai Pangandaran tidak dibuka maka menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Disparbud juga bekerjasama antara tim yang dibentuk yaitu tim monitoring Pantai Pangandaran dengan satgas Covid 19 di Pangandaran. Tujuan dilakukannya kerjasama agar Pantai Pangandaran dapat dibuka dengan terhindar dari Covid 19. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antar instansi agar Pantai Pangandaran tetap dibuka kembali dan wisatawan terhindar dari Covid 19.

Akan tetapi dari Pantauan peneliti bahwa tim monitoring hanya terlihat di Pintu masuk Pantai Pangandaran, yang mana tim monitoring yang bertugas memantau wisatawan dan pelaku wisata yang berdatangan ke Pantai Pangandaran. Sedangkan di beberapa titik keramaian tidak terlihat tim monitoring yang bertugas untuk memantau dan menghimbau langsung kepada wisatawan dikarenakan antara jumlah tim monitoring Disparbud dan jumlah wisatawan jumlahnya tidak sebanding. Lalu yang seharusnya wisatawan yang tidak mematuhi prokes, akan tetapi banyak dari wisatawan yang kurang terpantau oleh tim monitoring Disparbud dikarenakan antara tim monitoring dengan jumlah wisatawan kalah jumlah.

Peneliti menganalisis bahwa Pintu masuk Pantai Pangandaran, yang mana tim monitoring yang bertugas memantau wisatawan dan pelaku wisata yang berdatangan ke Pantai Pangandaran. Disparbud sudah menyiapkan SOP untuk disosialisasikan oleh tim monitoring Covid 19 kepada wisatawan Pantai Pangandaran, Pemahaman tim monitoring covid 19 sudah baik dengan melakukan sosialisasi kepada wisatawan yang datang ke sana.

c. Intensitas Tanggapan

Tanggapan dengan adanya program pengembangan Pariwisata pada saat Covid menurut para pedagang dan pelaku wisata di Pantai Pangandaran adalah bahwa program ini baik dilaksanakan dikarenakan dengan dibukanya Pantai Pangandaran maka para pedagang dan pelaku wisata mendapatkan penghasilannya kembali dikarenakan dengan dibukanya kembali

Pantai Pangandaran maka wisatawan yang datang menjadi ada.

Akan tetapi dalam observasi yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa banyak pelaku usaha di kawasan wisata yang kurang mematuhi protokol penanggulangan Covid di Pantai Pangandaran dikarenakan mereka merasa aman dari Covid-19. Maka dari itu tugas Disparbud untuk dapat menjelaskan bagaimana program pariwisata dengan kegiatan pengembangan Covid yang sedang dijalankan. Dikarenakan para pelaku usaha di kawasan wisata berpikir bahwa Corona sudah berlalu bahkan dianggap sudah hilang.

6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi program yang dibuat oleh pmda maupun pihak yang lain. Dikarenakan ke tiga aspek ini dapat mempengaruhi bagaimana proses keberjalanan suatu program. Lingkungan sosial ini membahas aspek sosial, yang mana lingkungan sosial menjadi salah satu aspek indicator dari keberhasilan suatu program. Begitu juga dengan aspek ekonomi dan politik juga menjadi salah satu aspek indikator dari keberhasilan program yang dijalankan. Aspek ekonomi membahas keuangan. Jadi disini dibahas sejauh mana lingkungan eksternal yang menentukan apakah berhasil atau tidaknya suatu program dari kebijakan yang dirancang oleh pihak tertentu. Dikarenakan lingkungan eksternal sangat mempengaruhi proses perencanaan program dari suatu kebijakan. Dari Van Meter Dan Van Horn sebagaimana yang dikutip dari Agustino (2012:144) Dikatakan bahwa suatu implementasi program dari suatu kebijakan memiliki pengaruh, beserta dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal.

Menurut analisa peneliti masyarakat Pantai Pangandaran masih terdampak pada PSBB yang dilakukan oleh Pemda Pangandaran sehingga menyebabkan Pantai Pangandaran ditutup. Yang mana apabila Pantai Pangandaran ditutup maka mereka tidak dapat berjualan dan berdampak pada tidak adanya pendapatan.

a. Lingkungan Sosial

Instrumen dalam lingkungan sosial adalah masyarakat, yang mana masyarakat ikut menentukan dalam suatu program

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah saat ini membuat program kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan juga dengan memerhatikan kebutuhan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi tidak serta merta membuat suatu kebijakan tanpa adanya pertimbangan kepada pihak lain.

Pada Program Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pantai Pangandaran, Masyarakat Pantai Pangandaran ikut terlibat dalam pengembangan Pariwisata. Pada saat Covid 19 berlangsung, Pantai Pangandaran ditutup dalam waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan Pantai Pangandaran dibuka dengan pembatasan pengunjung yang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Program ini diberlakukan dalam rangka agar Masyarakat Pantai Pangandaran dan sekitar terlindungi dari Covid 19. Sehingga pada saat penutupan, Pantai Pangandaran sepi. Akan tetapi revitalisasi gate tol Pangandaran tetap dilakukan dalam rangka penataan kawasan wisata.

Akan tetapi pada saat Covid 19 banyak dari pelaku wisata yang kehilangan sumber mata pencahariannya. Sehingga mereka sempat menjual aset mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka tidak memiliki sumber mata pencaharian dari selain berdagang atau menyewakan penginapan di area Pantai Pangandaran. Maka dari itu di lingkungan sosial Pantai Pangandaran, banyak warga yang protes dikarenakan Pantai Pangandaran ditutup dalam jangka waktu yang lama. Pihak Badan Permusyawaratan Desa saat peneliti melakukan wawancara juga menyebut bahwa setelah ditutup dalam jangka waktu yang lama, ketika ada wacana akan ditutup kembali dalam waktu satu bulan mereka sangat khawatir, dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi pada saat Covid 19 banyak dari pelaku wisata yang kehilangan sumber mata pencahariannya. Sehingga mereka sempat menjual aset mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka tidak memiliki sumber mata pencaharian dari selain berdagang atau menyewakan penginapan di area Pantai Pangandaran. Maka dari itu di lingkungan sosial Pantai Pangandaran, banyak warga

yang protes dikarenakan Pantai Pangandaran ditutup dalam jangka waktu yang lama. Pihak Badan Permusyawaratan Desa saat peneliti melakukan wawancara juga menyebut bahwa setelah ditutup dalam jangka waktu yang lama, ketika ada wacana akan ditutup kembali dalam waktu satu bulan mereka sangat khawatir, dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian para wisatawan juga jenuh apabila Pantai Pangandaran ditutup dalam waktu yang lama dikarenakan mereka membutuhkan destinasi wisata seperti Pantai Pangandaran. Peneliti mewawancarai wisatawan yang datang ke Pantai Pangandaran dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi dari medsos bahwa Pantai Pangandaran dibuka kembali. Wisatawan merasa senang dikarenakan mereka sudah jenuh apabila lama dirumah. Maka mereka berinisiatif untuk liburan.

Pangandaran memiliki keterbatasan dalam menerapkannya dikarenakan selain infrastruktur teknologi yang kurang, sebagian masyarakat Pantai Pangandaran ada yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi secara lebih mendalam. Seperti contoh dalam penggunaan telepon pintar masih sebatas untuk berkomunikasi, akan tetapi masih belum bisa digunakan untuk mengolah video (editing). Maka dari itu dari aspek sosial nya sendiri dalam penerapan wisata virtual masih kurang dikarenakan penggunaan teknologi sendiri masih terbatas.

b. Lingkungan Ekonomi

Instrumen ekonomi juga penting dikarenakan di dalam pemerintahan suatu daerah, ekonomi merupakan salah satu instrumen yang penting. Yang mana masyarakat dan pemerintahan dalam kegiatan sehari-hari menggunakan instrumen ekonomi. Seperti ketika masyarakat bekerja mereka menginginkan bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Begitu juga pemerintah yang melakukan investasi kepada BUMD, yang bertujuan agar daerah tersebut terpenuhi perekonomiannya. Ketika perekonomiannya terpenuhi, maka akan membantu keberjalanan suatu pemerintahan.

Pada Kawasan Pantai Pangandaran yang dilingkungannya terdiri dari Pelaku

usaha, Warga Pantai Pangandaran, Aparat Desa Pangandaran, Disparbud Pangandaran mereka saling membutuhkan satu sama lain, yang mana Pantai Pangandaran dikelola oleh Disparbud sebagai pembuat suatu Program. Disparbud membuat program dalam rangka agar Pantai Pangandaran bisa selalu didatangi oleh banyak wisatawan, sehingga para pelaku wisata dan warga Pantai Pangandaran menjadi sejahtera dan pihak desa juga lebih mudah dalam menjalankan roda pemerintahannya di lingkungan Desa. Pihak Desa juga mendapatkan bagian dari pengelolaan Pantai Pangandaran yang dikelola oleh Disparbud. Lalu wisatawan sebagai objek wisata yang menikmati lokasi dengan membayar uang masuk dan membeli produk di Pantai Pangandaran.

Akan tetapi pada masa Pandemic Covid-19 saat ini, Pantai Pangandaran ditutup lebih dari 6 bulan. Selain itu apabila dibuka terjadi pembatasan wisatawan, sehingga yang datang ke Pantai Pangandaran menjadi sedikit dikarenakan banyak wisatawan memilih untuk berlibur disekitar rumahnya. Hal ini berdampak pada pendapatan para pelaku wisata di Pantai Pangandaran. Dengan diberlakukannya penutupan di Pantai Pangandaran maka banyak dari pelaku wisata yang kehilangan Mata pencahariannya. Ketika saya mewawancarai BPD Pangandaran, anggota BPD tersebut mengatakan bahwa para pelaku wisata sampai menjual asset mereka untuk penuhi kebutuhan sehari hari. Disparbud juga kehilangan PAD yang lumayan signifikan dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran sedikit yang datang.

Berikutnya wacana dari Pemda Pangandaran yang merupakan salah satu solusi dari agara mendapat PAD yang besar adalah dengan mengadakan wisata Virtual. Wisata virtual tersebut sudah dicontohkan oleh Kemenparkraf RI, yang mana wisata virtual ini efektif untuk mencegah terjadinya kerumunan disuatu tempat. Selain itu wisata Virtual dapat mendongkrak PAD yang besar dikarenakan bisa dijangkau online oleh siapapun yang menikmatinya.

Ketika mewawancarai Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata dikatakan juga bahwa Disparbud belum mengadakan wisata

Virtual. Apabila dipertimbangkan kembali dan bekerjasama dengan pihak swasta dengan skema tertentu dapat dijalankan wisata virtual tersebut.

c. Lingkungan Politik

Lingkungan Politik juga berpengaruh terhadap pengambilan dan penerapan suatu program yang sudah dibuat oleh Pemda. Pemda membuat program kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh Pemda. Staff Pemda sendiri memiliki berbagai macam latar belakang politik yang mempengaruhi penerapan suatu program kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemda di Lingkungan Masyarakat. Dikarenakan perbedaan latar politik antar staff Pemda dan atasan, maka sedikit sulit ketika menentukan dan menerapkan suatu program kebijakan dikarenakan perbedaan kepentingan. Sehingga apabila menjadi permasalahan penerapan program kebijakan dikarenakan perbedaan latar politik antar staff maupun atasan Pemda, maka diperlukan suatu SOP dalam melaksanakan suatu pekerjaan di Pemda.

Disparbud Pangandaran memiliki 31 pegawai PNS yang memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para staff, terdapat SOP yang mengatur bagaimana tata cara staff dalam bekerja. Program pengembangan pariwisata di Pantai Pangandaran dilakukan dalam rangka memajukan Pariwisata di Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran sampai saat ini merupakan salah satu ikon pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran dikarenakan keindahan Pantai tersebut. Jadi pada masa pandemic Covid 19 saat ini pemerintah tetap membuka Kawasan Pantai Pangandaran dalam rangka agar target PAD yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah dapat tercapai.

Yang mana setelah peneliti pantau dan wawancarai pihak Desa, banyak dari pelaku wisata yang belum diberikan pelatihan khusus bagaimana cara berdagang dan mendapat untung dari penjualan selain di sector Pariwisata. Dikarenakan Pantai Pangandaran saat ini masih sering ditutup dan diberlakukannya PSBB, yang mana pembatasan jumlah wisatawan diharuskan dalam rangka mencegah penularan Covid 19.

Begitu juga dengan wacana wisata virtual yang sudah dicanangkan oleh Pemda Pangandaran, bahwa sudah diwacanakan akan diadakan wisata virtual. Akana tetapi belum terlaksana dikarenakan infrastruktur teknologi yang kurang. Selain itu dari sisi kebijakan masih banyak pertimbangan antar instansi yang menyebabkan kegiatan wisata virtual tidak terlaksana.

KESIMPULAN

Atas dasar penelitian yang sudah dilakukan pada Implementasi Program Pengembangan Pariwisata pada saat Covid, maka dapat disimpulkan dari ke 6 dimensi implementasi program, masih terdapat 4 dimensi implementasi yang belum terlaksana, yakni pada dimensi standard dan sasaran kebijakan, dimensi Komunikasi Organisasi, Sumber daya dan Lingkungan ekonomi. Dikarenakan pada dimensi standar dan sasaran kebijakan masih terdapat pelaksanaan program pelayanan covid yang belum memenuhi standar, seperti masih banyak nya pelanggaran Covid. Lalu berikutnya Komunikasi organisasi yang dinilai masih terdapat mis komunikasi antar stake holder, yaitu dari Pihak Disparbud, wisatawan, dan pedagang mengenai pemerataan jadwal pembukaan Pantai Pangandaran. Kemudian Sumber daya yang mengalami kendala dikarenakan SDM yang melakukan monitoring terhadap pencegahan Covid 19 di Pantai Pangandaran yang baru berjumlah 5 orang dan Sumber daya finansial yang ditarik oleh Pemkab Pangandaran, sehingga Disparbud tidak bisa menjalankan program pengembangan Pariwisata dengan baik dan dari dimensi lingkungan social, ekonomi dan politik masih bermasalah dikarenakan para pelaku usaha Pantai Pangandaran masih terdampak pada PSBB yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali.

REFERENSI

- Wilopo, K. K., & Hakim, L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 42(1), 58.
- Sudana, I. P. (2013). Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 13(1), 11.
- Lilik Sudarniasih., Sri Maryuni., A. E. (2015). *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu Kabupaten Mompawah*. 3-9.
- Aulia, B., Aliyah, I., & Sugiarti, R. (2019). Analisi Permintaan dan Penawaran Wisata Kraton Kasunan Surakarta. *Journal Cakra Wisata*, 20(2), 48-60. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/download/34108/22452>
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69.
- IKHSAN, M. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SINJAI*.
- Purwahita, A. A. A. R. M., Bagus, P., Wardhana, W., & Ardiasa, I. K. (2021). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP PARIWISATA BALI DITINJAU DARI SEKTOR SOSIAL , EKONOMI , DAN (SUATU TINJAUAN PUSTAKA)*. 1(2).
- Wahidah, I., Septiadi, M. A., Rafqie, M. C. A., Fitria, N., Hartono, S., & Athallah, R. (2020). *Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 Pandemic : Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures*. 11(3), 179-188.
- Yuliana. (2020). *Wellness and healthy magazine*. 2(February), 187-192.

